



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

NOMOR : 001/KINTB/PSI-KEP.1/I/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 18 Januari 2024 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

HAMZANWADI

Beralamat di Sengkerang I Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. Di dalam persidangan dihadiri oleh HAMZANWADI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

Beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 19A, Kota Mataram. Di dalam Pesidangan dihadiri oleh Jaka Wahyana,SPd, selaku Kuasa Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai surat permohonan informasi pada angka 1 dan 2 yaitu:

1. Salinan Dokumen Informasi Sumber Dana untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Praya Timur, Kab. Lombok Tengah TA 2023.
2. Salinan DPA untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Praya Timur, Kab. Lombok Tengah TA 2023.
3. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah TA 2023.



Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Suaeb selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

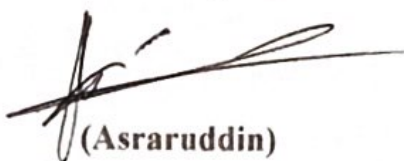
Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, 18 Januari 2024** oleh Majelis Komisioner yaitu **Asraruddin** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Sansuri** masing-masing sebagai Anggota.

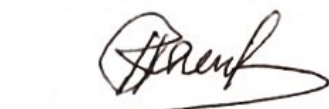
Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Suratni sebagai Panitera Pengganti.



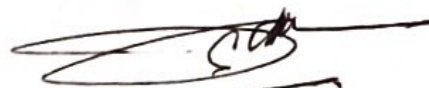
Ketua Majelis




(Asraruddin)

Anggota Majelis


(M. Zaini)


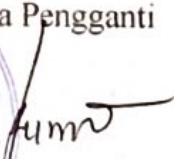
Anggota Majelis


(Sansuri)


Panitera Pengganti

(Suratni)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 18 Januari 2024


Panitera Pengganti

(Suratni)